

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Global Humanity Network dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza selama periode 2023 - 2025 dibentuk sebagai respons terhadap kondisi blokade Israel yang membatasi akses masuknya bantuan kemanusiaan. Blokade tersebut tidak hanya memengaruhi jalur distribusi, tetapi juga proses pengadaan barang, perizinan, koordinasi dengan mitra, hingga pelaksanaan program di lapangan. Dalam situasi tersebut, GHN tidak berupaya mengubah kebijakan blokade, melainkan menyesuaikan mekanisme kerja organisasi agar bantuan tetap dapat disalurkan kepada masyarakat sipil. Kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi tersebut menjadi faktor utama yang memungkinkan keberlangsungan program kemanusiaan selama periode penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi advokasi GHN dijalankan melalui tiga strategi yang saling melengkapi, sebagaimana dirumuskan dalam teori Transnational Advocacy Network (TAN). Melalui *information politics*, GHN memanfaatkan *Situation Report*, poster digital, serta berbagai kanal media sosial untuk menyampaikan perkembangan kondisi kemanusiaan di Gaza secara kredibel dan cepat, sekaligus membangun transparansi terhadap donor dan publik. Melalui *symbolic politics*, organisasi menggunakan narasi, kisah personal, forum akademik, serta kegiatan seni dan budaya, seperti konser amal dan Safari Dongeng, untuk membingkai isu Gaza secara emosional maupun intelektual sehingga mampu menggerakkan simpati dan partisipasi publik yang secara fisik berjarak dari lokasi konflik. Adapun melalui *leverage politics*, GHN membangun komunikasi dan jejaring dengan aktor yang memiliki kewenangan serta sumber daya lebih besar, seperti pemerintah Indonesia, organisasi kemanusiaan resmi di Mesir dan Yordania (ERCS dan JHCO), forum internasional seperti SEAHUM, serta lembaga filantropi, institusi pendidikan, dan sektor swasta, sehingga pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada

kapasitas internal organisasi, melainkan turut didukung oleh kolaborasi lintas aktor.

Strategi pada *leverage politics* tersebut pula yang menjelaskan kemampuan GHN untuk terus menyesuaikan diri terhadap dinamika konflik dan perubahan kebijakan akses di lapangan. Maka dari itu, jika dibandingkan bergerak secara mandiri, GHN justru mampu mengubah jalur distribusi ketika akses Rafah ditutup, menyesuaikan jenis bantuan sesuai dengan regulasi yang berlaku, mengolah daging kurban menjadi produk kaleng agar lebih tahan lama selama proses distribusi, menempatkan relawan lokal di beberapa wilayah Gaza, serta menerapkan prosedur kerja yang mempertimbangkan kondisi keamanan di lapangan. Berbagai langkah tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penyaluran bantuan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya sumber daya organisasi, melainkan oleh kemampuan GHN untuk terus mempertahankan sumber daya dan otoritas aktor lain di tengah resiko dan perubahan situasi yang terus berlangsung.

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori Transnational Advocacy Network (TAN), yang menjelaskan bagaimana GHN memanfaatkan penyebaran informasi yang kredibel (*information politics*), narasi kemanusiaan dan nilai solidaritas (*symbolic politics*), serta pembangunan jejaring dengan aktor-aktor yang lebih berkuasa dan bersumber daya (*leverage politics*) untuk mendukung pelaksanaan bantuan kemanusiaan di tengah blokade. Dalam penelitian ini, blokade Israel diposisikan sebagai konteks struktural yang membentuk kondisi lapangan tempat ketiga taktik tersebut dijalankan, dan bukan sebagai kerangka analisis yang berdiri sendiri.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi advokasi Global Humanity Network dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza tidak bergantung pada satu pendekatan tunggal, melainkan pada kombinasi tiga taktik TAN, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, dan *leverage politics*, yang saling menopang satu sama lain. Hal tersebut memungkinkan organisasi tetap mampu menjalankan program kemanusiaannya di tengah keterbatasan akses yang ditimbulkan oleh blokade Israel. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa organisasi non-pemerintah

memiliki peran penting dalam mempertahankan keberlangsungan penyaluran bantuan kemanusiaan melalui kemampuannya mengelola informasi, membangun narasi, dan menjalin jejaring dengan aktor-aktor yang lebih berkuasa dalam sistem kemanusiaan global.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak terkait maupun peneliti selanjutnya yang bertujuan untuk mendukung perkembangan kajian serta praktik bantuan kemanusiaan yang lebih efektif.

6.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, strategi Global Humanity Network dalam penyaluran bantuan kemanusiaan selama periode 2023–2025 menunjukkan bahwa kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan situasi di lapangan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan operasi di tengah blokade. Oleh karena itu, pengalaman operasional yang diperoleh selama proses penyaluran bantuan perlu dipertahankan sebagai pembelajaran kelembagaan melalui dokumentasi prosedur, evaluasi berkala terhadap mekanisme distribusi, serta penguatan koordinasi dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional. Upaya tersebut tidak hanya bermanfaat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program kemanusiaan, tetapi juga menjadi landasan bagi organisasi dalam merespons dinamika akses dan tantangan operasional yang terus berubah pada situasi krisis di masa mendatang.

6.2.2 Saran Teoritis

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi organisasi kemanusiaan di wilayah konflik tidak dapat dipahami hanya dari perspektif jejaring advokasi transnasional, tetapi juga perlu mempertimbangkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan operasional akibat blokade. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian yang mengintegrasikan Transnational Advocacy Network (TAN) pada konteks konflik atau krisis

kemanusiaan lainnya, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana organisasi kemanusiaan membangun jejaring, menyesuaikan strategi operasional, dan mempertahankan keberlangsungan penyaluran bantuan di tengah berbagai pembatasan akses.